

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akar dari krisis multidemensi yang menyerang stabilitas ekonomi di Indonesia belum diungkap secara sistematis, sehingga mengakibatkan lemahnya fundamental ekonomi yang mencakup bidang moneter dan perbankan, yang didalamnya terdapat nilai tukar, dimana nilai tukar merupakan syarat pokok dari kestabilan perekonomian negara. Jika dilihat dari sudut pandang agama Allah menuntut keprofesionalan otoritas moneter dalam menjalankan roda perekonomian, serta berlaku adil dalam membuat suatu kebijakan, seperti firman-Nya sebagai berikut:

قال جعلني على خزائن الارض ؎ اني حفيظ عليم (55)

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (mesir) karena sesungguhnya aku pandai menjaga, dan berpengetahuan” (QS. Yusuf: 55).

Selain keprofesionalan dalam manajemen keuangan negara, Allah juga memerintahkan untuk berbuat adil, seperti dalam Firman-Nya:

يا ايها الذين امن ان كثير من الاحبار ولرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله قل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا فبشرهم بعذاب اليم^{لا} (34) يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم قل هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (35)

Artinya: Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At Taubah 34-35).

يا ايها الذين امنوا اتكلوا اموالكم بينكم باطل الا ان تكون تجارة عن ترض منكم قل ولا تقتلوا انفسكم قل ان الله كان بكم رحيمًا (29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-nisa:29).

Terpeliharanya stabilitas moneter adalah salah satu dimensi stabilitas nasional yang merupakan bagian *integral* dan sasaran pembangunan nasional maka stabilitas yang mantap mempunyai pengaruh yang luas terhadap kegiatan perekonomian yang diantaranya adalah perbankan. Menurut Pohan (2008), indikator kebijakan moneter yang pada umumnya menempatkan dua indikator kebijakan moneter penting, yakni suku bunga dan jumlah uang beredar diantaranya nilai tukar rupiah.

Namun demikian dalam keseharian perekonomian, hanya indikator suku bunga dan kondisi keuangan yang dapat dimonitor langsung oleh masyarakat, sebagai tolok ukur stabilitas moneter yaitu, nilai tukar yang realistis atau seimbang dan suku bunga pada tingkat yang wajar (Pohan, 2008:51).

Bank Indonesia selaku Bank Sentral berdasarkan pasal 4 Ayat Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 lembaga negara yang independen, yang dalam

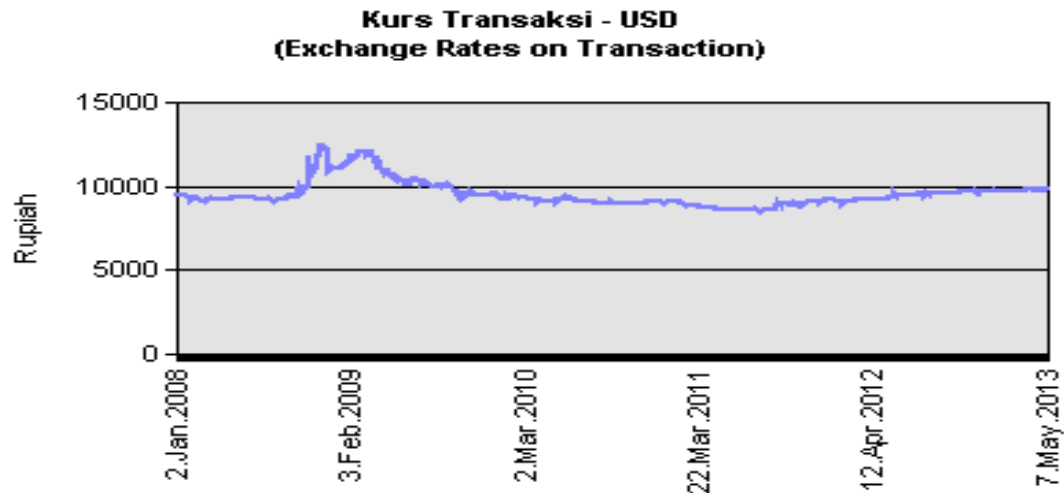
kapasitasnya sebagai bank sentral yaitu mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan rupiah (Kunawangsih & Pracoyo, 2005:165).

Kesalahan Bank Indonesia dalam mengambil langkah dan antisipasi terhadap pihak swasta menggunakan investasi dapat memicu tidak setabilnya nilai tukar, ada dua aspek yang turut memicu terjadinya depresiasi rupiah yang demikian cepat seperti yang terjadi dipriode awal krisis, yaitu:

1. Komposisi pinjaman lepas (*offshore borrowing*) yang dilakukan swasta nasional berjangka pendek dan dipergunakan untuk keperluan investasi berjangka panjang;
2. Penerapan sistem mengambang terkendali (*managed float system*) yang sejalan dengan kebijakan pengendalian inflasi yang menghasilkan tingkat depresiasi rupiah yang hanya berkisar 3% sampai 5% per tahun yang menyebabkan rupiah *over valued*.

Sehingga pada saat pinjaman-pinjaman tersebut jatuh waktu dan permintaan pada nilai tukar luar negeri (*foreign exchange*) yang tidak mampu dilayani oleh mesin ekonomi maka nilai tukar rupiah dengan cepat memburuk.

Grafik 1.1
Transaksi Nilai Tukar Rupiah Tahun Terhadap USD
2008-2012



Source : Bank Indonesia

Sumber : Kurs, BI, 2013

Dalam Grafik 1.1, terlihat perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Notasi yang digunakan adalah jumlah rupiah yang dibayarkan untuk mendapatkan satu dolar Amerika. Nilai tukar cenderung stabil, namun pada saat terjadi lonjakan nilai tukar, yaitu periode Oktober 2008 hingga Januari 2009, suku bunga acuan juga mengalami lonjakan pada periode yang sama seperti terlihat grafik suku bunga acuan.

Seperti yang telah dikemukakan diatas perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat terkait erat terhadap nilai tukar rupiah dan pertumbuhan tingkat suku bunga yang disebut resiko pasar (*market risk*) bagi perbankan. Perkembangan tingkat suku bunga yang tidak wajar secara langsung dapat mengganggu perkembangan. Perbankan. Disatu sisi suku bunga akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk

menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat, sementara disisi lain suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga akan menurunkan kegiatan produksi didalam negeri.

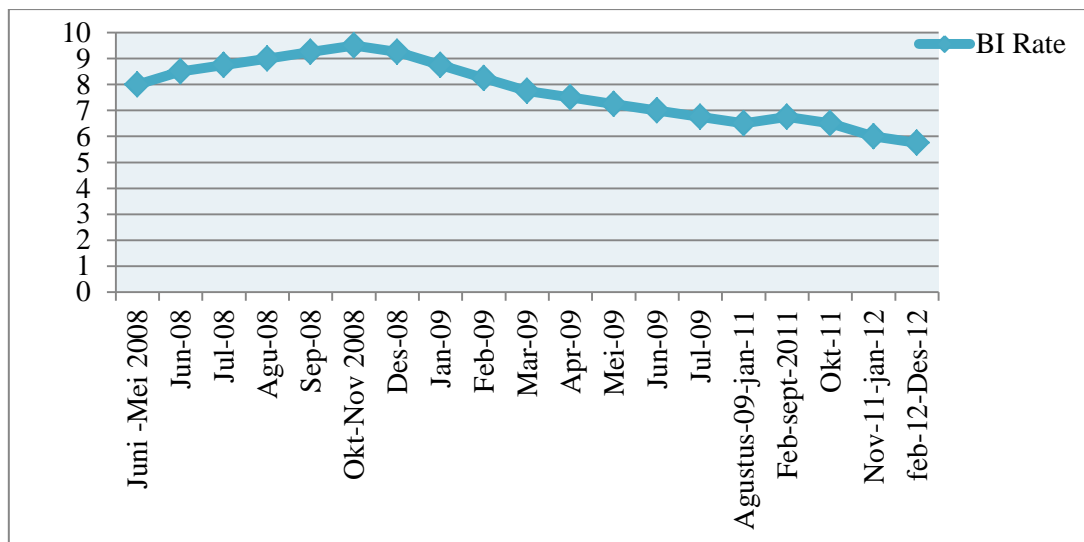
Menurunnya produksi akan pada gilirannya akan menurunkan juga kebutuhan dana oleh dunia usaha dan berakibat permintaan terhadap kredit atau pembiayaan perbankan juga menurun. Sehingga kemana dana itu akan disalurkan (Pohan: 2008:53).

Tapi lain halnya dengan Naceur (2003) yang melihat adanya hubungan negatif antara suku bunga yang memiliki bukti empiris menunjukkan bahwa tingginya suku bunga secara signifikan akan berpengaruh pada tingginya tingkat penyaluran kredit atau pembiayaan bank (Molyneux & Thornton:1992). Ini merupakan bagian dari transmisi kebijakan moneter, penurunan suku bunga acuan diharapkan diikuti penurunan suku bunga perbankan sehingga dampak terhadap akselerasi pertumbuhan pembiayaan dapat dirasakan.

Namun demikian penyesuaian suku bunga perbankan memerlukan waktu yang lama, baik karena pertimbangan dari sisi internal bank maupun industri perbankan, yang diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter, termasuk salah satu pengelolaan pembiayaan pada Perbankan Syariah.

Terdapat fenomena penurunan suku bunga acuan pada tahun 2007 hingga mencapai level yang hampir sama dengan kondisi tahun 2008 yakni pada tingkat 8% (November 2007). Seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik1.2
Perkembangan suku bunga acuan (BI Rate) Tahun 2008-2012



Sumber : BI Sumber (diolah)

Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan suku bunga acuan (*BI rate*) sebagai salah satu instrumen utama dalam menerapkan kebijakan moneter. Berdasarkan grafik 1.2, terlihat bentuk pola suku bunga acuan (*BI rate*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, suku bunga acuan (*BI rate*) mulai diberlakukan pada tahun 2005. Sebelum tahun 2005 digunakan instrumen SBI. Berdasarkan analisa melalui bentuk grafik, terlihat bahwa pola grafik nilai tukar rupiah terhadap USD dan suku bunga acuan memiliki perbedaan yang begitu signifikan terutama pada tahun

2006 dan terdapat kemiripan pada tahun 2008 karena pergerakannya bersamaan yaitu mengalami peningkatan.

Perkembangan ekonomi suatu negara akan tumbuh sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang dilakukan peran *financial intermediary* terutama industri perbankan. *Financial intermediary* secara umum adalah institusi, misalnya bank yang memfasilitasi penyaluran dana (*chanelling of funds*) dari pihak *lender* ke pihak *borrower* secara tidak langsung.

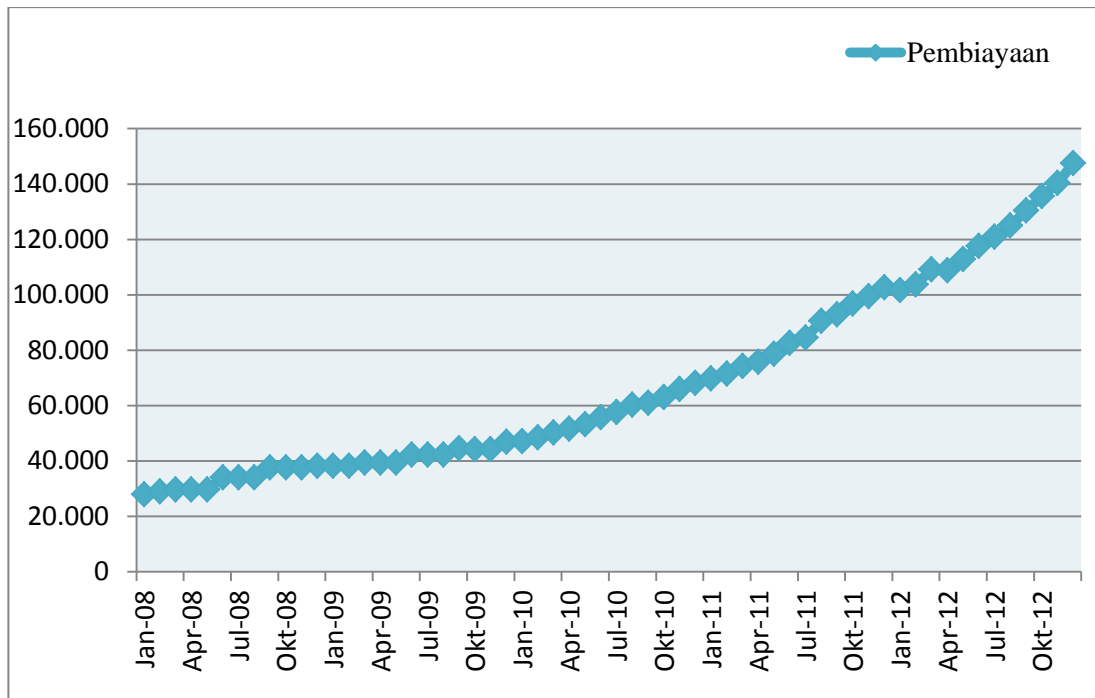
Dengan peran *financial intermediary* tersebut maka pihak yang memiliki dana (*surplus units*) dapat mengalokasikan dananya kepada yang kekurangan dana (*defisit units*). Perekonomian yang semakin berkembang akan membutuhkan peran *financial intermediary* terutama dari industri perbankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi atau ekspansi usaha yang semakin meningkat.

Industri perbankan menghimpun dana dari pihak ketiga (DPK) yang merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank, dalam bentuk tabungan, giro dan simpanan bernilai, untuk selanjutnya disalurkan kembali dengan tujuan memperoleh profit. Salah satu bentuk penyaluran perbankan syariah adalah berupa pembiayaan (*bank syariah*). Penyaluran dana industri perbankan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat baik individu ataupun korporasi untuk berbagai bentuk seperti, konsumsi, modal usaha dan lain-lain selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam lingkup Indonesia.

Peran pokok perbankan dalam perekonomian Indonesia yang sangat besar terhadap peran industri perbankan pembiayaan untuk membiayai konsumsi maupun investasi. Sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh profit, bank-bank dalam industri perbankan syariah berusaha untuk mendapatkan profit yang menguntungkan yang secara umum dari kegiatan mengumpulkan dana dan menyalurkan dana perbankan saat ini, memang dapat pulih seperti pada saat sebelum krisis ekonomi 1997/1998.

Penurunan penyaluran dana industri perbankan juga disebabkan oleh penawaran kredit atau menurunnya kredit yang berasal dari faktor akibat keengganan bank menyalurkan dana dan menjadi takut resiko atau *risk averse* (Citra, 2007). Seperti pada saat krisis ekonomi ekonomi 1997/1998. Krisis nilai tukar yang terjadi di Indonesia mengakibatkan eksposur industri perbankan dan perusahaan terhadap perubahan kurs akan semakin besar terutama bagi bank dengan perusahaan yang mempunyai kewajiban dalam bentuk mata uang asing disaat bersamaan tingginya kenaikan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia *negative interest margin* pada perbankan.

Grafik1.3
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Perbankan Syariah
Priode 2008- 2012 (Miliaran rupiah)



Sumber: bank indonesia (data diolah)

Dari grafik diatas terlihat jelas bahwa adanya peningkatan yang signifikan pada pembiayaan setiap tahunnya, dimana peningkatan ini berbeda dengan stabilitas nilai tukar dan tingkat suku bunga acuan yang cenderung tidak stabil. Sehingga pertumbuhannya menjadi meningkat, alasan yang bisa dikemukakan terkait belum terlihatnya pengaruh penurunan suku bunga acuan terhadap perkembangan pembiayaan perbankan syariah adalah suku bunga acuan yang semakin menurun belum terlalu berpengaruh terhadap laju ekspansi pembiayaan perbankan syariah.

Untuk penyaluran pembiayaan sendiri, keringnya likuiditas di pasar akan sangat menghambat industri *multifinance* untuk mengembangkan pembiayaannya hingga pertumbuhan sampai 10-20%. industri pembiayaan yang mencakup *consumer finance*, *leasing*, dan *anjak piutang* mayoritas mengandalkan sumber dana dari pinjaman bank dan sebagian kecil dari pinjaman langsung lainnya dalam negeri dan asing.

Setelah itu sulitnya mendapatkan *funding* dari bank dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit baru yang memiliki beban suku bunga, pembiayaan lebih tinggi menyesuaikan dengan naiknya biaya dana. Tingginya suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia dikhawatirkan akan menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan, yakni potensi naiknya pembiayaan macet menjadi lebih besar meski kucuran pembiayaan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Dengan melihat kondisi nilai tukar, suku bunga acuan dan tingkat pembiayaan kelompok bank syariah dalam perindustrian perbankan yang ada saat ini, maka akan dapat ditahui bagaimana tingkat pembiayaan perbankan syariah di indonesia dari tahun-ketahun, dengan demikian semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek produksi dalam usaha makro maupun mikro untuk mewujudkan pembangunan tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan karena belum banyak penelitian yang mengkaitkan antara nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan (*BI Rate*) terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah. Disamping itu juga untuk mengetahui seberapa bagaimana pengaruh dari nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan (*BI Rate*) terhadap tingkat pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Maka dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai.”**Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan (*BI Rate*) Terhadap Tingkat Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2005-2012**”.

1.2 Perumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap tingkat pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia ?
- 2) Bagaimana pengaruh Suku Bunga Acuan (*BI Rate*) terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2008-2012.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga acuan terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah di Indonesiadari tahun 2008-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan literatur bagi mahasiswa/i fakultas syariah jurusan ekonomi islam dan departemen pembangunan ekonomi pada umumnya dan yang ingin melakukan penelitian sejenis serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai makroekonomi dan dunia perbankan, khususnya pemahaman terhadap perbankan syariah.

2) Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan masukan bagi keberhasilan perbankan syariah terhadap fenomena eknomi yang dinamis serta dapat meningkatkan pembiayaan perbankan yang lebih efektif dan efesien kepada masyarakat indonesia.

3) Secara pribadi

Penulis mengharapakan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam dari hasil yang diteliti sehingga menambah khazanah ilmu wawasan bagi penulis.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional

1.5.1.1 Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel yang lain. Dua variabel bebas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

X₁ : Nilai Tukar Rupiah

X₂ : Suku Bunga Acuan (*BI Rate*)

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah tingkat pembiayaan yang selanjutnya diberi notasi Y.

1.5.2 Definisi Oprasional Variabel

1.5.2.1 Nilai Tukar Rupiah

Dimaksud nilai tukar disini dimana setiap 1 rupiah dihitung terhadap besarnya nilai mata uang dolar AS. Sehingga nilai tukar rupiah menunjukkan nilai dari mata uang dolar AS yang ditranslasikan dengan mata uang rupiah. Sebagai contoh, USD 1 = Rp. 9000.00 artinya apa bila 1 dolar dihitung dengan menggunakan rupiah maka nilainya adalah %Rp. 9000.00. Data yang digunakan untuk penelitian adalah nilai tukar Rupiah/UU\$ mulai Juli 2008 sampai Desember 2012.

1.5.2.2 Suku Bunga Acuan (*BI Rate*)

Besarnya tingkat suku bunga acuan (*BI rate*) menjadi salah satu faktor bagi perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang ditawarkan.

Begitu juga sebaliknya bagi perbankan itu sendiri, yakni dengan semakin banyaknya dana yang ditanamkan oleh masyarakat akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan, sehingga secara otomatis bank akan mendapatkan profit yang tinggi dari hasil pembiayaan tersebut. Data yang diambil penelitian ini adalah laporan suku bunga acuan (*BI rate*) mulai Juli 2008 -Desember 2012.

1.5.2.3Tingkat Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya.

Atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli yang lazim disebut dengan *profit sharing* sehingga menghasilkan margin atau keuntungan. Dari margin per tahun dapat dilihat tingkat pembiayaan perbankan syariah yang mengalami peningkatan

atau sebaliknya mengalami penurunan. Data pembiayaan yang digunakan sejak Juli 2008- Desember 2012.

1.5.3 Sampel

Salah satu langkah dalam penelitian adalah menentukan obyek yang akan diteliti dan besarnya sampel yang ada. Menurut Sugiyono (2004) yang dimaksud dengan sampel adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia yang sampai Desember 2012 berjumlah 34 Bank. Demikian juga dengan penelitian ini tidak semua sampel diteliti tetapi hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti diharapkan bahwa hasil yang didapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) perbankan Syariah Indonesia tahun 2012

No	UnitUsaha Syariah	No	Bank Umum Syariah
1	PT Bank Danamon	1	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
2	PT Bank Permata	2	PT Bank Syariah Mandiri
3	PT Bank Internasional Indonesia (BII)	3	PT Bank Syariah Mega Indonesia
4	PT CIMB Niaga	4	PT Bank Syariah BRI
5	HSBC, Ltd.	5	PT Bank Syariah Bukopin
6	PT Bank DKI	6	PT Bank Panin Syariah
7	BPD DIY		

8	BPD Jawa Tengah (Jateng)	7	PT Bank Victoria Syariah
9	BPD Jawa Timur (Jatim)	8	PT BCA Syariah
10	BPD Banda Aceh	9	PT Bank Jabar dan Banten
11	BPD Sumatera Utara (Sumut)	10	PT Bank Syariah BNI
12	BPD Sumatera Barat (Sumbar)	11	PT Maybank Indonesia Syariah
13	BPD Riau		
14	BPD Sumatera Selatan (Sumsel)		
15	BPD Kalimantan Selatan (Kalsel)		
16	BPD Kalimantan Barat (Kalbar)		
17	BPD Kalimantan Timur (Kaltim)		
18	BPD Sulawesi Selatan (Sulsel)		
19	BPD Nusa Tenggara Barat (NTB)		
20	PT BTN		
21	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)		
22	PT OCBC NISP		
23	PT Bank Sinarmas		
24	BPD Jambi		
Σ	BUS:11 bank	Σ	UUS: 24 bank

Sumber: Statistik Pembiayaan Syariah, BI.2013

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

1.5.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian.

1.5.4.2 Sumber Data

1.5.4.3 Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dari laporan Bank Indonesia periode Januari 2008 sampai Desember 2012, yang diperoleh melalui website resmi Bank tersebut. Berupa laporan nilai tukar rupiah Bank Indonesia, laporan perkembangan suku bunga acuan (*BI rate*) dan laporan pembiayaan pada statistik perbankan syariah (SPS) yang dipublikasikan pada website resmi Bank Indonesia.

1.5.5 Metode Analisis Data

1.5.5.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah bentuk analisis yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian berupa studi literatur laporan statistik pembiayaan yang diambil dari laporan Bank Indonesia tentang perbankan syariah.

1.5.5.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial atau ekonomi yang terdiri dari perumusan masalah, menyusun model, mengumpulkan data, mencari solusi dan mengimplementasikan hasil (Kuncuro, 2011:3-4) atau bentuk analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu. Untuk mempermudah menganalisis penelitian menggunakan program SPSS versi 16.0. Analisis data ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh nilai tukar rupiah dan suku

bunga acuan (*BIRate*) terhadap tingkat pembiayaan bank syariah. Variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua, yakni X_1 : nilai tukar rupiah dan X_2 : suku bunga acuan (*BI Rate*). Sedangkan variabel terikat adalah tingkat pembiayaan bank syariah.

1.5.6 Alat Analisis Data

1.5.6.1 Uji Asumsi Klasik

1.5.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (Ghozali, 2012:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks korelasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) dan Tolerance-nya. Menurut Santoso (2003), apabila nilai matrik korelasi tidak lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis terlepas dari gejala multikolinieritas. Kemudian apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai Tolerance mendekati 1, diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

1.5.6.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residu atau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas.

Dan jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Santoso,2003). Salah satu cara untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik Scatter Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID).

1.5.6.4 Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali (2001), Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara:

1. Melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.
2. Dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui perlakuan akan berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data terlihat normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

1.5.6.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu teknik ketergantungan. Sehingga variabel yang akan dibagi menjadi variabel yang akan dibagi menjadi variabel dependen/terikat (Y) dan variabel independen/bebas (X). Analisis ini menunjukkan bahwa variabel dependen akan bergantung (terpengaruh) pada lebih dari satu variabel independen. Bentuk analisis regresi berganda ini adalah:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Keterangan:

B = Koefisien regresi

Y = Variabel terikat yaitu tingkat pembiayaan

X₁ = Variabel bebas yaitu nilai tukar rupiah

X₂ = Variabel bebas yaitu suku bunga acuan (*BI rate*)

e = Standar error/ kesalahan pengganggu (residu)

Dimana Y (variabel dependen) merupakan variabel yang akan diramalkan (tingkat pembiayaan). Sedangkan X₁, X₂ adalah variabel independen yang diketahui

akan dijadikan dasar dalam membuat ramalan tersebut (nilai tukar rupiah, suku bunga acuan).

1.5.6.6 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara simultan dan pengujian secara parsial. Pengujian secara simultan menggunakan uji F, sedangkan pengujian secara parsial menggunakan uji t. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah.

H_2 = Ada pengaruh suku bunga acuan (*BI rate*) terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah.

Dasar pengambilan keputusan Ghozali(2006) :

1. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , Apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila $F_{tabel} < F_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

1.5.6.7 Uji Signifikansi F (secara simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan (*BI Rate*) secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, yaitu tingkat pembiayaan. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berfikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakikatnya hipotesis merupakan jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah itu sendiri. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara 2 (dua) variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh nilai tukar dan suku bunga acuan (*BI Rate*) terhadap tingkat pembiayaan Bank Syariah.

1.5.6.8 Uji Signifikansi t (secara parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah variabel X_1 , X_2 benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y. Hipotesis yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah : $H_0 : b_i = 0$, Variabel-variabel bebas (nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (pembiayaan).

$H_1 : b_i < 0$, Variabel-variabel bebas (nilai tukar rupiah) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (tingkat pembiayaan).

$H_2 : b_i > 0$, Variabel-variabel bebas (suku bunga acuan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (tingkat pembiayaan). Dasar pengambilan keputusan Ghozali(2006) :

1. Dengan membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabel. Apabila t tabel $>$ t hitung, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila t tabel $<$ t hitung, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$)
2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. Apabila angka probabilitas signifikansi $>$ 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila angka probabilitas signifikansi $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

1.5.6.9 Analisis Uji R^2 (koefisien determinasi)

Koefisien determinan (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi (R^2) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ladasan Teori

2.1.1 Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar atau kurs (*foreign exchange rate*) antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah harga mata uang suatu negara relative terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut.

Pengertian lain dari nilai tukar menurut Greenwald dalam Karim (2010), adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga (*domestic currency*) atau reseprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.

2.1.1.1 Metode Menyatakan Nilai Tukar

Menurut Abimanyu, ada dua cara untuk menyatakan nilai tukar, yaitu:

a. Model Eropa (*Indirect quote*)

Model tersebut adalah cara yang paling umum dipakai dalam perdagangan valuta asing antar bank seluruh dunia. Nilai tukarnya ditetapkan dengan

menghitung berapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri.

b. Model Amerika (*direct quote*)

Model tersebut didefinisikan sebagai harga mata uang asing dalam mata uang domestik, atau berapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli satu mata uang asing. Metode tersebut dipakai di Indonesia.

2.1.1.2 Sistem Nilai Tukar

Seperti yang lazim didengar sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu Merupakan suatu sistem nilai tukar dimana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Setelah runtuhnya *Fixed Exchange Rate System* maka timbul konsep baru yaitu *Floating Exchange Rate System*, dalam konsep ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang.

Menurut Gilis (1996), dalam Abimanyu (2004:8-10), terdapat enam sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia antara lain:

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (*fixed exchange rate*)

Dalam sistem ini otoritas moneter selalu mengintervensi pasar untuk mempertahankan nilai tukar mata uang sendiri terhadap satu mata uang asing tertentu. Intervensi tersebut memerlukan cadangan devisa yang relatif besar. Tekanan terhadap nilai tukar valuta asing, yang biasanya bersumber dari defisit neraca perdagangan, cenderung menghasilkan kebijakan devaluasi.

2. Sistem Nilai Mengambang Bebas (*free floating exchange rate*)

Sistem ini berada pada kutub yang bertentangan dengan sistem *fixed*. Dalam sistem ini, otoritas moneter secara teoritis tidak perlu mengintervensi pasar sehingga sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. Sistem ini berlaku di Indonesia saat ini.

3. Sistem *Wider Band*

Pada sistem tersebut nilai tukar dibiarkan mengambang atau berfluktuasi diantara dua titik, tertinggi dan terendah. Apabila keadaan perekonomian mengakibatkan nilai tukar bergerak melampaui batas tertinggi dan terendah tersebut, maka otoritas moneter akan melaksanakan intervensi dengan cara membeli atau menjual rupiah sehingga nilai tukar rupiah berada diantara kedua titik yang telah ditentukan.

4. Sistem Mengambang Terkendali (*Managed Float*)

Dalam sistem ini, otoritas moneter tidak menentukan untuk mempertahankan satu nilai tukar tertentu. Namun, otoritas moneter secara kontinyu melaksanakan intervensi berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya

cadangan devisa yang menipis. Untuk mendorong ekspor, otoritas moneter akan melakukan intervensi agar nilai mata uang menguat.

5. Sistem *Crawling Peg*

Otoritas moneter dalam sistem ini mengaitkan mata uang domestik dengan beberapa mata uang asing. Nilai tukar tersebut secara periodik dirubah secara berangsur-angsur dalam persentase yang kecil. Sistem ini dipakai di Indonesia pada periode 1988-1995.

6. Sistem *Adjustable Peg*

7. Dalam sistem ini, otoritas moneter selain berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar juga berhak untuk merubah nilai tukar apabila terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi.

2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Keseimbangan nilai tukar akan berubah seiring dengan perubahan atas permintaan dan penawaran valuta asing yang bersangkutan. Menurut Madura (2006:128), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan nilai tukar adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Inflasi

Perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional karena mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta, dengan demikian mempengaruhi nilai tukar. Naiknya harga-harga secara umum pada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya akan menyebabkan naiknya permintaan barang-barang dari negara lainnya dan permintaan atas uang tersebut. Dengan naiknya permintaan valuta asing tersebut akan menaikkan mata uang negara tersebut dibandingkan dengan mata uang negara sendiri, akibatnya terjadilah apresiasi mata uang negara tersebut.

2. Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga relatif mempengaruhi investasi terhadap sekuritas asing, yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Jadi, naiknya tingkat suku bunga disuatu negara dibandingkan dengan negara lainnya, maka akan menyebabkan naiknya permintaan atas uang negara yang bersangkutan. Dengan demikian mata uang negara tersebut menguat dibandingkan dengan mata uang negara lainnya.

3. Tingkat Pendapatan

Apabila tingkat pendapatan suatu negara meningkat karena adanya tambahan kemampuan untuk memasok, maka mata uang tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila tingkat pendapatan suatu negara meningkat karena permintaan didalam negeri maka nilai mata uang tersebut akan menurun.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah yang mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang dengan cara sebagai berikut:

- a. Penentuan batas-batas nilai tukar
- b. Penentuan batas-batas perdagangan luar negeri
- c. Intervensi dalam pasar valuta asing
- d. Perubahan-perubahan variabel makro seperti; inflasi tingkat suku bunga, dan lain-lain.

5. Pengharapan (*ekspektation*)

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar adalah ekspektasi akan nilai tukar dimasa depan. Pasar valuta asing bereaksi cepat terhadap berita yang memiliki dampak kedepan. Sebagai contoh, berita akan melonjaknya inflasi di indonesia akan menyebabkan pedagang valuta asing menjual rupiah untuk mengantisipasi turunya nilai tukar rupiah dimasa datang. Respon tersebut akan benar-benar membuat nilai tukar rupiah mengalami penurunan.

2.1.1.4 Perkembangan Sistem Nilai Tukar di Indonesia

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sistem nilai tukar di Indonesia pada intinya dikelompokkan menjadi empat bagian. Penetapan sistem nilai tukar oleh Bank Indonesia didasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Perry dan Solikin (2003) memaparkan sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- 1. Sistem Nilai Tukar Bertingkat (*Multiple Exchange Rate System*)**, Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi dua digit selama periode tersebut.
- 2. Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)**, Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikat yaitu tarif US\$1 = Rp415,00. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971-1978. Neraca pembayaran tersebut kuat karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor yang didukung oleh peningkatan harga minyak mentah (masa keemasan minyak).

3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (*Managed Floating Exchange Rate*), Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing (*basket currency*). Pada periode ini telah terjadi tiga kali devaluasi yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar riil yang lebih baik. Pada sistem ini, nilai tukar dibagi dalam tiga periode yaitu:

- a. ***Managed Floating I (1978-1986)***, terjadi fluktuasi nilai tukar yang tidak terlalu besar dengan nilai kurs berkisar antara Rp625,38 hingga Rp1.644,10. Periode tersebut lebih didominasi oleh ketidakpastian manajemen dari Bank Indonesia dibandingkan ketidakpastian *floating* karena situasi perekonomian pada saat tersebut belum berkembang. Hal ini dapat dilihat oleh adanya pergerakan nilai tukar nominal yang relatif tetap dan perubahan relatif baru terjadi pada tahun-tahun dimana Indonesia melakukan devaluasi rupiah.
- b. ***Managed Floating II (1987-1992)***, Pada periode ini juga terjadi devaluasi walaupun tidak terlalu besar dengan nilai kurs antara Rp1.644,10 hingga Rp2.053,40. Namun pada periode ini, unsur *floating* lebih dominan dibandingkan ketidakpastian manajemen. Artinya, peran Bank Indonesia dalam melakukan intervensi pada pasar uang lebih sedikit dibandingkan pergerakan kurs yang ditentukan oleh pasar uang itu sendiri.

Pemilihan strategi ini dalam rangka menjaga daya saing produk ekspor melalui pergerakan mata uang dalam kisaran sempit.

- c. ***Managed Floating*** dengan ***Crawling Band Sistem*** (**September 1992-Agustus 1997**), terjadi depresiasi nilai tukar yang kisarannya antara Rp2.053,40 hingga Rp2.791,30. Pada periode ini unsur *floating* semakin diperlakukan dengan kisaran yang semakin lebar. Pada 1 September 1992, Bank Indonesia menetapkan rentang intervensi Rp10 dengan batas bawah Rp2.035 dan batas atas Rp2.045. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1997 (akhir periode), Bank Indonesia akhirnya memperlebar rentang intervensi menjadi Rp304 dengan batas bawah Rp2.378 dan batas atas Rp2.682. Dengan demikian Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan pelebaran *band intervention* secara bertahap dan akhirnya *band intervention* dihapus sehingga rupiah lebih *floating* dibandingkan periode sebelumnya.

4. **Sistem Mengambang Bebas (*Free Floating Exchange Rate System*)**

Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalam sistem ini Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Awalnya, penerapan sistem nilai tukar mengambang ini menyebabkan terjadinya gejolak yang berlebihan (*overshooting*). Misalnya kurs pada tanggal 14 Agustus melemah tajam menjadi Rp2.800 per dolar dari posisi Rp2.650 per dolar pada penutupan hari sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus

merosot, mulai dari aksi ambil untung (*profit taking*) oleh pelaku pasar, tingginya permintaan perusahaan domestik terhadap dolar untuk pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo, memburuknya perkembangan perbankan nasional, maupun oleh sebab-sebab lain.

Dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut, pada bulan November 1997, *International Monetary Fund* (IMF) masuk ke Indonesia. Dengan kondisi dalam negeri yang bergejolak, terutama situasi sosial politik, program pemulihan ekonomi yang dilakukan bersama-sama dengan IMF tidak dengan segera membuahkan hasil. Sampai akhir Desember 1997, nilai tukar rupiah ditutup pada kisaran Rp5.000 per dolar, tetapi pergerakan nilai tukar rupiah semakin tak terkendali hingga mencapai puncaknya pada 22 Januari 1998 dimana kurs mencapai Rp16.000 per dolar.

2.1.1.5 Konsep Keseimbangan Nilai Tukar

Berdasarkan pendekatan hukum permintaan dan penawaran, maka harga dari valuta asing seperti USD akan menjadi lebih mahal dari nilai nominalnya apabila permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan, atau jumlah permintaan tetap sementara penawaran berkurang. Sebaliknya, harga valuta asing akan menjadi lebih murah dari harga nominal atau harga berlakunya bila permintaan sedikit sementara penawaran banyak, atau permintaan semakin menurun meskipun jumlah penawaran tetap. Pada mekanisme pasar, nilai tukar terjadi pada saat tercapainya titik keseimbangan yaitu pada saat permintaan sama dengan penawaran.

2.1.1.6 Nilai Tukar Dalam Islam

Untuk memudahkan penyebab apresiasi atau depresiasi (*fluktuasi*) nilai tukar suatu mata uang di dalam islam digolongkan dalam dua kelompok (Karim, 2007:168-169) yaitu:

1. Perubahan terjadi di dalam negeri diantaranya disebabkan oleh:

a. Natural exchange rate fluctuation

1. Fluktuasi nilai tukar rupiah akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif, ekspansi permintaan agregatif akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Seperti diketahui bahwa jika tingkat harga didalam negeri naik sedangkan tingkat diluar negeri tetap maka tingkat nilaitukar akan mengalami penurunan (*defresiasi*). Sebaliknya jika permintaan agregatif mengalami kontraksi maka tingkat harga akan mengalami kenaikan (*apresiasi*).
2. Fluktuasi nilai tukar akibat perubahan-perubahan yang terjadi akibat penawaran agregatif, jika penawaran agregatif mengalami kontraksi, maka akan berakibat akan naiknya tingkat harga secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan melemahnya (*defresiasi*) nilai tukar. Sebaliknya jika penawaran agregatif mengalami ekspansi maka akan berakibat menurunnya tingkat harga pada turunny tingkat harga secara keseluruhan yang akan mengakibatkan menguatnya (*apresiasi*) nilai tukar.

b. Human error exchange rate fluctuation

1. *Corruption and Bad Administration*, korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga terjadinya misallocation of resources serta *mark-up* yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksi. Akibatnya, tingkat harga secara keseluruhan akan mengalami kenaikan
2. *Excessive Tax*, pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual barang dan jasa tersebut. Secara agregatif tingkat harga akan mengalami peningkatan. Tingkat pajak yang sangat tinggi akan mengakibatkan pada melemahnya (*defresiasi*) nilai tukar uang.
3. *Excessive Seignorage*, efek dari penciptaan uang yang berlebihan (melebihi kebutuhan sektor riil) adalah kenaikan harga secara keseluruhan atau inflasi.

2. Perubahan harga terjadi diluar negeri

Perubahan yang terjadi harga yang terjadi diluar negeri bisa digolongkan karena dua sebab yaitu:

a. Non-Engineered/ Non-Manipulated Changes

Perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Misalnya jika Bank Sentral Singapura (BBS) mengurangi jumlah uang SGD yang beredar, maka hal tersebut

akan mengakibatkan IDR terdepresiasi tanpa diduga (direncanakan oleh Bank Indonesia). Sehingga BI akan menghilangkan efek ini dengan menjual SGD yang dimilikinya (cadangan devisa), baik cara bersih intervensi steril (*sterilizedintervention*) maupun dengan cara intervensi tidak steril (*unsterilizedintervention*).

b. Engineered/ManipulatedChanges

Perubahan yang terjadi oleh manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dikmaksudkan untuk merugikan pihak lain. Seperti para meneger keuangan (*fundmanager*) di Singapura melepas IDR yang dimilikinya sehingga terjadi banjir rupiah sehingga mengakibatkan nilai tukar mengalami depresiasi secara tiba-tiba atau drastis diluar perkiraan bank Indonesia (BI).

2.1.2 Suku Bunga Acuan (*BI rate*)

Menurut Siamat (2003),Suku bunga acuan (*BI rate*)adalah suku bunga dengan tenor satu tahun yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara preodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter. Dengan demikian bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan dan tertapnya suku bunga acuan (*BI rate*)tersebut.Sedangkan pengertian lain dari suku bunga acuan (*BIRate*) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan di umumkan kepada publik (www.bi.go.id).

Suku bunga acuan (*BIRate*) atau disebut *RediscountRate* adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengontrol Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat bunga atau tingkat diskonto. Akibat dari naik-turunnya tingkat diskonto akan mempengaruhi tingkat pinjaman-pinjaman bank umum kepada masyarakat.

Jika suatu saat jumlah uang yang beredar (JUB) dimasyarakat terlalu banyak maka Bank Sentral akan menaikkan *Discount Rate*-nya terhadap bank-bank umum untuk membatasi minat masyarakat untuk melakukan pinjaman, sehingga diharapkan JUB tidak bertambah lagi atau bisa dikendalikan. Sebaliknya jika JUB masih kurang atau terlalu sedikit maka pemerintah melalui Bank Sentral akan melakukan kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga, dengan harapan daya beli (*purchasingpower*) masyarakat bertambah dengan adanya tingkat bunga pinjaman yang rendah (Amaliah, 2010:36).

Sedangkan suku bunga acuan (*BI Rate*) ataupun tingkat bunga diterapkan dengan memperhatikan berbagai resiko. Dalam buku yang ditulis Rinsky.k. Judiseno dalam Amaliah berjudul sistem moneter dan perbankan di Indonesia, resiko-resiko tersebut yaitu:

1. Resiko kurang lancarnya pengambilan pinjaman, bunga pinjaman dan resiko tidak kembalinya pinjaman (*creditrisk*)
2. Resiko bank terhadap pemenuhan likuiditas yang meliputi resiko tidak kembalinya adanya penarikan dana nasabah bank dan penyediaan cadangan minimal.

3. Resiko inflasi yang mengakibatkan terjadinya penyusutan nilai uang.
4. Resiko perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perbankan yang dapat mengakibatkan kerugian bukan kehancuran bahkan.
5. Resiko depresiasi dan apresiasi mata uang.
6. Resiko akibat kurang mampunya operasional bank untuk memperoleh penghasilan atau kegiatan usahanya.
7. Resiko keadaan suatu negara seperti masalah ekonomi politik dan keamanan yang dapat menurunkan surat berharga yang dimiliki bank.
8. Resiko yang diakibatkan oleh kegiatan bank dalam mewakili kepentingan pemegang surat berharga.
9. Biaya resiko lainnya seperti biaya transaksi dan administrasi perbankan.

Semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh pihak bank maka semakin besar kecenderungan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan resiko yang mungkin datang dari sisi kreditur adalah kemungkinan dari suatu kegagalan debitur dalam melunasi utangnya atau sama sekali tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dengan begitu pihak bank bank harus dapat melakukan penilaian terhadap nasabahnya, seperti penilaian terhadap:

- a. *Character* yaitu, penilaian karakter debitur berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kewajibannya.

- b. *Capacity* yaitu, penilaian terhadap kemampuan *financial debitor* dalam memenuhi kewajiban yang dijanjikan
- c. *Colateral* yaitu, penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh debitur agar kebutuhan pendanaannya menjadi layak.
- d. *Condition* yaitu, penilaian terhadap situasi mikro dan makro yang meliputi kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Penerapan bunga dalam kehidupan sehari-hari dilarang dalam Islam karena bunga sama halnya dengan riba. Suku bunga acuan (*BIRate*) adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan sistem perekonomian di Indonesia. Penentuan suku bunga acuan (*BIRate*) oleh Bank Indonesia diharapkan dapat diikuti oleh industri perbankan nasional dalam penetapan suku bunga.

Penerapan suku bunga acuan (*BIRate*) seperti yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia pada dasarnya menyalahi ajaran Islam walaupun tujuannya memberikan kestabilan dalam perekonomian Indonesia. Dengan adanya perbankan yang tidak mengikuti peraturan Bank Indonesia dalam penetapan suku bunga memberikan pilihan positif kepada umat Islam yang ada di Indonesia, karena mereka dapat memilih untuk tetap menerapkan sistem bunga dalam kehidupannya atau sebaliknya memilih untuk meninggalkan bunga dan menjalankan segala macam transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran syariat yaitu meninggalkan bunga.

2.1.2.1 Konsep Bunga

Setiap negara memiliki standar moneter dengan dengan ukuran satuan moneter. Hal itu ditentukan oleh otoritas moneter yang berbedaserta sistem moneter, kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter menjaga stabilitas jumlah uang beredar dimasyarakat juga berbeda-beda.

Indonesia menerapkan bunga sebagai instrumen moneter yang selalu digunakan dalam berbagai kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter. Sekilas dapat dikatakan bahwa bunga adalah suatu bentuk penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan dananya (*surplus units*) untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dana (Judisseno, 2005:83). Jadi konsep suku bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Suku bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan oleh kreditur.

2.1.2.2 Fungsi Suku Bunga Acuan (*BI rate*)

Suku bunga acuan (*BI Rate*) diumumkan oleh Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia setiap rapat dewan gubernurbulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan

moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB).

Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan suku bunga acuan (*BI Rate*) apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga acuan (*BI Rate*) apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id).

2.1.2.3 Jadwal Penetapan Suku Bunga Acuan (*BI rate*)

Berdasarkan kondisi perekonomian yang selalu dinamis atau selalu mengalami perubahan maka bank sentral (BI) menetapkan suku bunga acuan pada beberapa kebijakan (www.bi.go.id), diantaranya sebagai berikut:

1. Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan dengan cakupan materi bulanan.
2. Respons kebijakan moneter (*BI Rate*) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya.
3. Penetapan respons kebijakan moneter (*BI rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam memengaruhi inflasi.

4. Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

2.1.2.4 Besar Perubahan Suku Bunga Acuan (*BI Rate*)

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan suku bunga acuan (*BI Rate*) yang dilakukan secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan *25 basis poin* (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan suku bunga acuan (*BI Rate*) dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps (www.bi.go.id).

2.1.3 Tingkat Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2002). Sedangkan menurut A. Karim dalam Antonio, Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga:

1. *Return Bearing financing*

Pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

2. *Charity financing*

Pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

3. *Return free financing*

Pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

2.1.3.1 Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan tingkat mikro menurut Muhammad(2002). Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha memerlukan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang usaha bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya produksinya.

4. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, sehingga mereka akan memperoleh hasil dari usaha mereka. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:
 - a. Memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
 - b. Upaya meminimalkan resiko yaitu usaha yang dilakukan agar menghasilkan laba yang maksimal sehingga pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dari pembiayaan.
 - c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dapat dilakukan dengan menggabungkan (*mixing*) antara sumber daya alam dengan sumber daya modal. Maka dengan demikian pembiayaan dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

2.1.3.2 Fungsi Pembiayaan

Menurut Sinungan dalam Muhammad(2002), pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan, jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan Menurut Tujuan:

1. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang (Antonio, 2001:160).

2. Pembiayaan investasi

Pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal (Karim, 2010:237), yang diperlukan untuk:

- a. *Pendirian proyek baru*, yakni pendirian atau pembangunan proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru.
- b. *Rehabilitasi*, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang suda rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- c. *Modernisasi*, yakni pergantian menyeluruh mesin/peralatan lama denagan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik atau lebih tinggi.
- d. *Ekspansi*, yakni penambahan mesin/peratan baru dengan teknologi sama atau lebih baik .
- e. *Relokasi proyek yang sudah ada*, yakni pemindahan lokasi peroyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari satu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat.

2. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

1. Pembiayaan jangka waktu pendek
2. Pembiayaan jangka waktu menengah
3. Pembiayaan jangka waktu panjang

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Menurut Akad

Pembiayaan pada bank Syariah menurut akad ada sembilan pembiayaan, dengan sistem bagi hasil (Parwatmadja & Tanjung : 2011:77), yaitu:

1. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mdharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai presentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan musyarakah bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.

2. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan bagi *mudharib* lebih besar daripada *shahibul maal*.

Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan mudharabah bank tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.

3. *Pembiayaan Murabahah*

Yaitu pembiayaan yang berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antar bank dan nasabah. Model pengembalian pengembalian talangan dana seluruhnya pada waktu jatuh tempodiberikan kepada objek pembiayaan yang tidak segera menghasilkan, seperti untuk kebutuhan trakto petani tuidak mungkin dibayar kembali sebelum tanamannya menghasilkan.

4. *Pembiayaan Ba'i Bithaman Ajil*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli sesuatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan dana talangan dana tersebut secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank denagan nasabah. Model pengembalian talangan dana secara mencicil diberikan kepada objek pembiayaan yang dapat segera menghasilkan misalnya seperti untuk kebutuhan kendaraan angkutan umum yang dapat segera menghasilkan setelah kendaraan diterima.

5. *Pembiayaan Salam*

Yaitu berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang sudah wujud tetapi masih harus menunggu waktu penyerahannya, dengan kewajiban mengembalikan dan tersebut secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Bank boleh memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah.

6. *Pembiayaan Istisna*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang belum wujud dan harus dibuat sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dan pemasok dan antara bank dan nasabah.

7. *Pembiayaan Ijarah*

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sampai sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut, pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan dari sewa dari nasabah.

8. *Pembiayaan Rhan*

Yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, dan batu mulia, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nasabah diwajibkan membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminannya. Bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan.

9. *Pembiayaan Qordhul Hassan*

Yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/infaq/shadaqah dan ingin memulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan. Nasabah yang berhasil dianjurkan untuk membayar zakat/infaq/shadaqah untuk memperkuat dana qardhul hasan. Bank memperoleh pengembalian biaya administrasi dan menampung zakat/infaq/Shadaqah dari nasabah yang berhasil usahanya.

Sedangkan menurut Soemitra (2010) secara garis besar pembiayaan syariah terbagi kedalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murahbahah*, *salam*, dan *istisna*.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
3. Pembiayaan berdasarkan akad *qord*, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimahnya pada waktu yang telah disepakati baik sekaligus maupun cicilan.
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IBT).
5. Pengambil alihan hutang berdasarkan akad *hawalah*.
6. Pembiayaan multi jasa.

2.1.3.4 Landasan Syariah dan Fatwa MUI

Hadits Al Khomsah Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.

Artinya ; *Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang-orang pun berkata: "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah lah al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta" (HR. Al-Khomsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).*

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya : *Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.* (HR. Tarmizi).

Tabel 2.1
Akad pembiayaan berdasarkan FatwaMajlis Ulama Indonesia (MUI)

No	Jenis Akad	Landasan Syariah
1	Murabahah	Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI /IV/2000 tentang murabahah
2	Salam	Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV2000 tentang jual beli salam
3	Mudharabah	Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan Mudharabah
4	Musyarakah	Fatwa DSN MUI No. 08/DS-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
5	Qardh	Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang qord
6	Ijarah	Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan ijarah
7	Ijarah muntahiya bittamlik	Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiya Bittamlik
8	Hawalah	Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV2000 tentang hawalah
9	PembiayaanMulti jasa	Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan multi jasa

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Citra Andriany (2007), dengan judul "*Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Prilaku Penyaluran dana Perbankan di Indonesia*" dengan menggunakan Vector Auto regresi sebagai alat analisisnya menemukan ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan nilai IRF dari uji VAR tersebut positif diantaranya adalah adanya waktu yang diperlukan oleh pasar untuk bereaksi terhadap kenaikan suku bunga acuan (*BI Rate*) dalam penyaluran kredit, karena kredit memerlukan aplikasi dan persetujuan yang memakan waktu sehingga tidak dapat langsung bereaksi terhadap perubahan suku bunga acuan (*BI Rate*). Kemudian suku bunga kredit masih dalam skala kecil sehingga pertumbuhan kredit tetap ada meskipun menurun atau berkurang.

Penelitian yang dilakukan Qorry Aiena (2011), yaitu "*Analisis Pengaruh BI Rate dan Pembiayaan Terhadap Kualitas Pembiayaan Bank Syariah*" menyimpulkan bahwa, ada pengaruh positif dan signifikan antara BI Rate terhadap

kualitas pembiayaan (NPF). Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan terhadap kualitas pembiayaan (NPF). Dari hasil analisis penerapan secara simultan variabel suku bunga acuan (*BI Rate*) dan pembiayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas pembiayaan bank

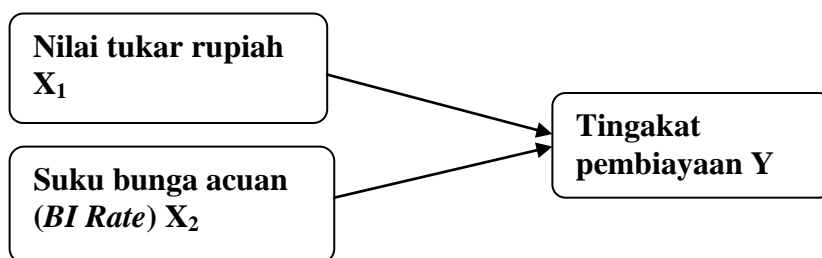
syariah(NPF). Berpengaruh pengaruh positif dan signifikan antara suku bunga acuan (*BI Rate*) dan pembiayaan terhadap kualitas pembiayaan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ayu Amaliah (2010) dengan penelitian "*Pengaruh BI rate terhadap volume pendanaan dan pembiayaan di bank syariah cabang bandung*" yaitu, variabel suku bunga acuan (*BI rate*) berpengaruh terhadap volume pendanaan dan pembiayaan BNI syariah cabang Bandung, yang menyatakan suku bunga acuan (*BI rate*) berpengaruh positif terhadap volume pendanaan dan pembiayaan BNI Syariah cabang Bandung.

2.4.2 Kerangka Penelitian

Untuk lebih memperjelas arah dari penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara nilai tukar dan suku bunga acuan yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan maka dalam penelitian ini dapat diambil suatu jalur pemikiran yang secara sederhana seperti pada gambar:

Gambar1.1
Kerangka Penelitian



Sumber :Data diolah, 2013

Kerangka penelitian diatas menjelaskan bahwa:

H₁ = Ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah.

H₂ = Ada pengaruh suku bunga acuan terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah.

Kerangka penelitian diatas menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan (*BIRate*) mempengaruhi tingkat pembiayaan perbankan syariah.

BAB III

Gambaran Umum

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual system*, yaitu bank konvensional dan bank syariah dari sisi pemenuhan prinsip syariah otoritas ada ditangan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sedangkan secara kelembagaan ditangani oleh Bank Indonesia. Dari sisi oprasional pada lembaga keuangan yang beroperasi, bank Indonesia dan departemen keuangan yang melakukan pengawasan.

3.1 Gambaran Perbankan di Indonesia

3.1.1 Bank Indonesia (*Bank Sentral*)

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, lahir pada juli 1953 yang didasarkan pada UU pokok Bank indonesia atau UU No. 11 tahun 1953 merupakan hasil nasionalisasi dari *De Javasche Bank*, sebuah bank belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda.

Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, untuk mencapai tujuan tersebut bank indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Perubahan sistem perbankan indonesia semakin menguat pasca diundangkannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai mana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti UU No. Tahun 2008 semakin

mempertegas status, tujuan, bank Indonesia selaku otoritas moneter. Dalam peranannya ada tiga bidang tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral (Soemitra, 2010) antara lain:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sebagai otoritas moneter bank indonesia menetapkan dan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam kaitannya bank indonesia menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan jalan memperluas dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.
3. Bank Indonesia juga berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak akan terlepas dari perananan dan kebijakan Bank Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan bank indonesia perbankan syariah di Indonesia yaitu, pada tahun 2002 Bank Indonesia menerbitkan cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yang memuat visi dan misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dan prioritas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam waktu kurun 10 tahun kedepan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syari'ah yang signitifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas

keuangan nasional regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya intergrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Padatahun 2008, sebagai amanah Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dibentuk suatu komite didalam internal Bank Indonesia untuk menindak lanjuti fatwa MUI, yaitu pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008. Tugas komite perbankan syariah adalah membantu melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

3.1.2 Bank Syariah

Perkembangan perbankan syari'ah dimulai pada tahun 1973 dengan didirikannya *Dubai Islamic Bank* yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian diikuti dengan berdirinya perbankan dan lembaga investasi lainnya yang 20 lembaga terakhir seperti lembaga perbankan islam Bank Dubai Islami, Baitu al-Tanwil al-Quwaity, Bank Faisal Islami, dan Bank Bahrain Islami.

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal dengan nama *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-freebanking*. Bank syariah pada mulanya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi keinginan berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan denagan pelarangan bunga, spekulasi dan ketidak jelasan.

Bank syariah atau disebut dengan bank islam adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah yang biasa disebut tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan HaditsNabi SAW (Muhammad, 2011). Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan.

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selau dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya pembiayaan atau kegiatan usaha (muhamad, 2011) diantaranya:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

3.1.3 Visi dan Misi Perbankan Syariah Indonesia

Demi menciptakan nasabah terutama kaum muslimin yang sejatera perbankan mempunyai visi dan misi, untuk mewujudkan tujuan itu bank memiliki visi terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*)” dan memiliki misimewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

3.1.4 Peranan Bank Syariah

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian masih relatif sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini adalah:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi oprasional perbankan syariah.
2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan oprasional perbankan syariah. Hal ini oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal
4. Jaringan kantor syariah yang masih terbatas

5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas
6. Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan jor-joran mempersulit segmen bank syariah.

Diantara peranan perbankan syariah (Karnaen, 1997), adalah (1) memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; (3) menjalinkerja sama dengan para ulama karena peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

Operasional perbankan di indonesia didasarkan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan UU No. 10 tahun 1998 dan diperbarui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antar keduanya karena tidak adanya *transferability risk* dan *return*. Tidak demikian halnya dengan perbankan syariah dimana perbankan syariah menjadi menjadi menajer investasi,

wakil atau pemegang amanat (*costodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil.

3.1.5 Struktur Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia

Secara umum lembaga perbankan syariah di Indonesia merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Merupakan usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha penghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank secara operasional dibinah dan diawasi oleh bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan disisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah berdasarkan jenisnya terdiri dari:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang dalam kegiatannya menjalankan lalu-lintas pembayaran.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Bank pembiayaan syariah (BPRS)

Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang berbentuk perseroan terbatas.

3.1.6 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Berkaitan dengan perbankan syariah tidak lepas dengan permasalahan yaitu mengenai sistem bunga. Setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1993, merupakan jawaban terhadap permasalahan bunga bank tersebut. Lebih lanjut dikatakan, bahwa tinjauan deregulasi selama 10 tahun telah sedikit banyak mengubah "wajah" sektor keuangan Indonesia.

Deregulasi finansial sebagai gantinya, mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan persaingan semakin hangat, termasuk didalamnya adalah persaingan perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan kembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu: BPR Syariah Mardhatillah, BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, yang terletak di Bandung.

Pada tahun 1992, di undangkannya UU perbankan No 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil, saat itu sudah berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) kemudian diikuti oleh BPR syariah Bangun Derajat Warga dan BPR Syariah Marga Rizki Bahagia, yang terletak di Yogyakarta (Antonio, 2000). Reaksi berikutnya juga muncul untuk melakukan revisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, diterbitkannya UU No. 10 memberikan keuntungan sendiri bagi dunia

perbankan nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank syari'ah berjalan semakin cepat dibanding bank konvensional sejak tahun 2000-an. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Perkembangan Bank Syari'ah (BUS/UUS/BPRS) dan Jumlah Kantornya di Indonesia periode 2008-2012

Jenis Bank	Kode	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Bank Umum Syariah (BUS)	JB	5	6	11	11	11
	JK	581	711	1.215	1401	14.21
Unit Usaha Syariah (UUS)	JBK	27	25	23	24	24
	JK	241	287	262	336	258
Bank Pembiayaan Syariah Rakyat (BPRS)	JB	131	138	150	155	155
	JK	202	225	286	364	374
Jumlah Kantor		1.024	1223	1.763	2.101	2.380

Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah, BI, 2013

Keterangan :

JK = Jumlah Kantor

JB = Jumlah Bank

JBK =Jumlah Bank Konvensional yang memiliki UUS

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk indonesia beragama islam. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan syariah.

Tabel 2.2

Jumlah bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) perbankan Syari'ah Indonesia priode 2012

No	Unit Usaha Syariah	No	Bank Umum Syariah
1	PT Bank Danamon	1	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
2	PT Bank Permata	2	PT Bank Syariah Mandiri
3	PT BII	3	PT Bank Syariah Mega Indonesia
4	PT CIMB Niaga	4	PT Bank Syariah BRI
5	HSBC, Ltd.	5	PT Bank Syariah Bukopin
6	PT Bank DKI	6	PT Bank Panin Syariah
7	BPD DIY	7	PT Bank Victoria Syariah
8	BPD Jawa Tengah	8	PT BCA Syariah
9	BPD Jawa Timur	9	PT Bank Jabar dan Banten
10	BPD Banda Aceh	10	PT Bank Syariah BNI
11	BPD Sumatera Utara	11	PT Maybank Indonesia Syariah
12	BPD Sumatera Barat		
13	BPD Riau		
14	BPD Sumatera Selatan		
15	BPD Kalimantan Selatan		
16	BPD Kalimantan Barat		
17	BPD Kalimantan Timur		
18	BPD Sulawesi Selatan		
19	BPD NTB		
20	PT BTN		
21	PT BTPN		
22	PT OCBC NISP		
23	PT Bank Sinarmas		
24	BPD Jambi		

Sumber : Statistik Pembiayaan Syariah, BI. 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik, pada juli 2005 Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS berjumlah 27 bankdan menjadi 35 bank BUS/UUS. Dengan peningkatan tersebut menunjukan selain tren, bahwa tingkat kesadaran bank umum untuk memberikan layanan syariah cukup tinggi.Kebutuhan masyarakat terhadap tingkatpelayanan perbankan syariah cukup baik.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian

Penggunaan metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Untuk menghindari bias teori dalam hasil pengolahan, maka variabel-variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nilai tukar rupiah terhadap USD (ribu rupiah)
Priode 2008-2012

No	Bulan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Januari	11.307	9.204	9.069	9.081	9.655
2	Pebuari	11.742	9.518	8.981	8.003	9.355
3	Maret	9.941	9.828	8.972	8.806	9.646
4	April	9.401	9.890	8.772	8.696	9.615
5	Mei	9.508	9.441	9.016	8.600	9.545
6	Juni	9.209	9.522	8.792	8.605	9.200
7	Juli	9.340	9.906	9.193	8.578	9.591
8	Agustus	9.333	10.454	8.939	8.583	9.324
9	September	8.945	10.735	9.076	8.769	9.221
10	oktober	8.920	11.535	9.220	8.933	9.206
11	November	8.280	11.905	9.085	9.057	9.383
12	Desember	8.547	11.200	9.335	9.120	8.846

Sumber : Statistik Pembiayaan Bank Syariah, BI, 2013 (diolah).

Dari tabel tersebut, dapat diketahui nilai tukar rupiah terhadap USD selama lima tahun, terlihat pada tahun 2009 nilai tukar berpluktuasi secara tajam mencapai rata-rata 11.000 yang berjumlah 5 bulan. Dan dari data tersebut, dapat diketahui statistik deskriptif untuk nilai tukar rupiah yang didapat dari hasil output SPSS Versi 16.0 sehingga diketahui rata-rata dan standar deviasi yang dapat.

Tabel 4.2
Suku bunga acuan (*BI rate*)
periode 2008-2013(persen)

No	Bulan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Januari	9.25	6.50	6.50	6.00	5.75
2	Pebuari	9.50	6.50	6.50	6.00	5.75
3	Maret	9.50	6.50	6.50	6.50	5.75
4	April	9.25	6.50	6.50	6.75	5.75
5	Mei	9.00	6.50	6.50	6.75	5.75
6	Juni	8.75	6.75	6.50	6.75	5.75
7	Juli	8.50	7.00	6.50	6.75	5.75
8	Agustus	8.25	7.25	6.50	6.75	5.75
9	September	8.00	7.50	6.50	6.75	5.75
10	oktober	8.00	7.75	6.50	6.75	5.75
11	November	8.00	8.25	6.50	6.75	5.75
12	Desember	8.00	8.75	6.50	6.50	6.00

Sumber : Statistik Pembiayaan Bank Syariah, BI,2013 (diolah).

Sejak di berlakukan juli 2005 suku bunga acuan (*BI rate*) mengalami tingkat yang pasang-surut seperti terjadi pada tahun tahun 2008 yang yang berfluktuasi yang cukup tinggi sebesar 8,00 sebanyak 7 kali dan 9,00 sebanyak 5 kali. Itu menunjukkan tingkat suku bunga acuan cenderung tidak stabil pada tahun-tahun sebelumnya dan cenderung Tetap (*stagnan*) pada tahun 2009, 20011 dan 2012.

Tabel4.3

**Tingkat pembiayaan perbankan syariah di Indonesia
periode 2008-2012**

No	Bulan	Tahun				
		2008	2019	2010	2011	2012
1	Januari	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505
2	Pebuari	37.681	44.253	65.942	99.427	140.318
3	Maret	37.681	44.253	62.995	96.805	135.581
4	April	37.681	44.523	60.970	92.839	130.357
5	Mei	34.100	42.195	60.275	90.540	124.946
6	Juni	34.100	42.195	57.633	84.556	120.910
7	Juli	34.100	42.195	55.801	82.616	117.592
8	Agustus	29.629	39.308	53.223	78.619	112.844
9	September	29.629	39.308	51.651	75.726	108.767
10	oktober	29.629	39.308	50.206	74.253	109.116
11	November	28.950	38.195	48.479	71.449	103.713
12	Desember	27.944	38.195	47.120	69.724	101.689

Sumber : Statistik Pembiayaan Bank Syariah, BI,2013 (diolah).

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya, hal ini tampak pada sampel yang digunakan sebanyak 60 yang terbukti semakin tingginya tingkat pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dari tahun-ketahun, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS).

Analisis atau interpretasi dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product And Service Solution*) versi 16.0 Analisis data ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan (*BI Rate*) terhadap tingkat pembiayaan.

Penggunaan metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata dan standar deviasi. Untuk memperoleh penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan peneliti dan menghindari bias teori dalam hasil pengolahan, maka variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TingkatPembiayaan	6.75633E1	33.513588	60
NilaiTukarRupiah	9.36853	.678162	60
SukuBungaAcuan	6.9333	1.07541	60

Berdasarkan hasil SPSS versi 16.0 diatas, maka diperoleh data analisis deskriptif. Dari penelitian ini, yaitu nilai tukar rupiah rata-rata sebesar 9.39132 . Ini menunjukkan tingkat nilai tukar yang cukup tinggi, karena jika nilai tukar rupiah naik terhadap dolar, akan menyebabkan tingkat pembiayaan lebih kompetitif.

Dari sisi suku bunga acuan (*BI rate*) tingkat suku bunga acuan yang rendah akan meningkatkan nisbah bagi hasil. Penurunan suku bunga acuan (*BI Rate*) juga akan menyebabkan nisbah bagi hasil dapat bersaing dengan Bank Konvensional. Namun jika suku bunga acuan (*BI Rate*) mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan kenaikan suku bunga perbankan dan akan meningkatkan kredit bermasalah dikarenakan pihak nasabah menanggung beban yang cukup tinggi. Selain itu, kemampuan nasabah dalam membayarkan kredit akan berkurang dan disini kembali berimbas pada sektor riil dimana banyak sektor riil yang mengandalkan penerimaan melalui sektor kredit.

Sehingga apabila pembayaran piutang mereka mengalami hambatan, tentunya akan mendorong pada sulit berkembangnya sebuah usaha. Sehingga potensi NPL /kredit macet akan mengalami peningkatan. Sedangkan suku bunga acuan (*BI Rate*) tertinggi yang dimiliki oleh bank umum syariah pada penelitian ini adalah pada tahun 2009.

Ini menunjukkan tingkat suku bunga acuan (*BI Rate*) sangat tinggi, karena dengan suku bunga acuan (*BI Rate*) tinggi akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu pihak nasabah akan meningkatkan simpanan kepada bank konvensional karena

mengharapkan imbalan bunga yang tinggi atau akan meningkatkan kredit bermasalah, yang berdampak pada sektor rill sehingga berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan. Hal ini dikarenakan jika pembayaran piutang mereka mengalami hambatan, tentunya akan mendorong sulit berkembangnya sebuah usaha sehingga berdampak pada ekspansi kredit karena pihak nasabah menanggung beban bunga yang tinggi.

4.2 Analisis Data dan Penelitian

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada/tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah dengan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Asumsinya adalah jika nilai tolerance kurang dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas serta nilai VIF tidak lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.5
Coefficient Correlations^a

Model		SukuBungaAcuan	NilaiTukarRupiah
1	Correlations Sukubungaacuan	1.000	-.417
	Nilaitukarrupiah	-.417	1.000
	Covariances Sukubungaacuan	4.108	-2.717
	Nilaitukarrupiah	-2.717	10.329

a. Dependent Variable: TingkatPembiayaan

Tabel 4.6
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Nilai tukar rupiah	.826	1.211
	Suku bunga acuan	.826	1.211

a. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak variabel nilai tukar rupiah dengan variabel suku bunga acuan yang agak tinggi dengan tingkat korelasi sebesar -0.417 atau sekitar 42%. Tetapi korelasi ini masih dibawah 95%, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10, jadi tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation factor (VIF) yang menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.1.1.2 Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi dilakukan dengan melihat nilai statistik Durbin Watson (DW). Tes pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW dengan d_u dan d_l pada tabel.

Tabel 4.7
Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.801	114.615	2	57	.000	1.430

a. Predictors: (Constant), Suku bunga acuan, Nilai tukar rupiah

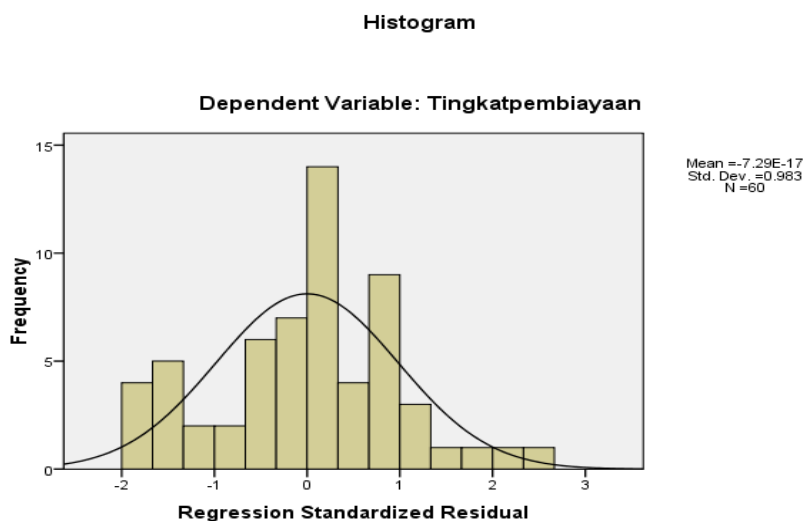
b. Dependent Variable: Tingkat pembiayaan

Pada tabel tersebut, angka Durbin Watson (DW) test sebesar 1.430. Menurut Santoso, patokan mendeteksi tidak adanya autokorelasi yaitu jika angka DW diantara -2 dan +2. karena angka DW test terletak diantara -2 dan +2. maka diambil keputusan bahwa model regresi ini tidak ada autokorelasi.

4.2.1.3 Uji Normalitas Data

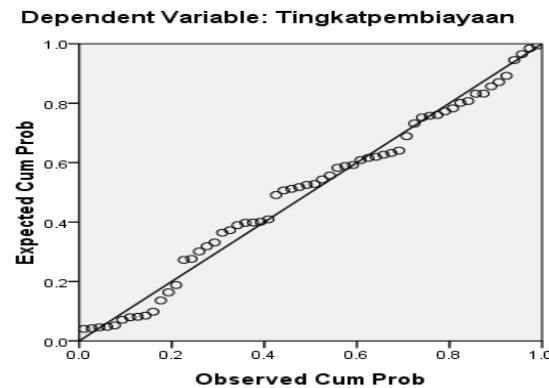
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Untuk melihat normalitas yaitu dengan melihat grafik histogram dan P-Pplot. Dengan asumsi, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal/grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh disekitar garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal/grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Grafik 4.1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Grafik 4.2

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupu grafik normal-p plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas maka, model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel independen.

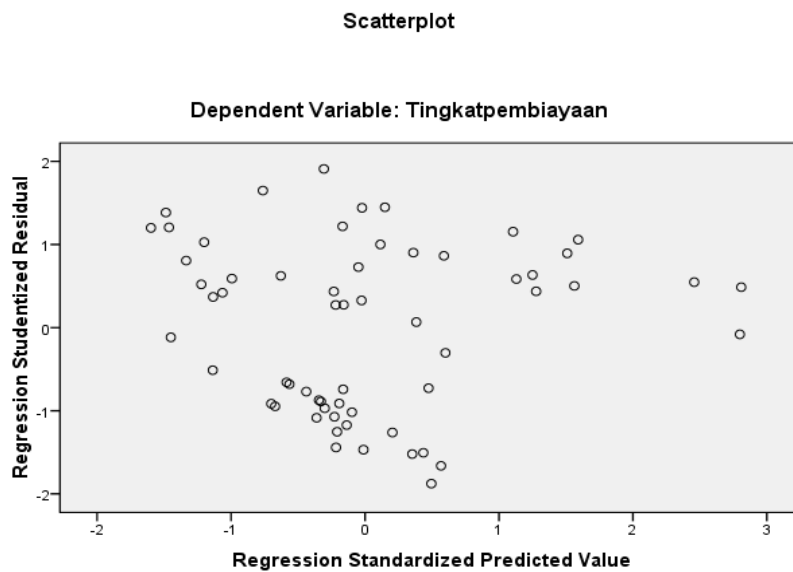
Pada grafik normal-plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan variabel nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan (*BI Rate*) keduanya mempunyai distribusi normal. Hal ini berarti model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan variabel tingkat pembiayaan dan variabel suku bunga acuan keduanya mempunyai

distribusi normal. Hal ini berarti model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi tidak terjadi heteroskedastisitas.



Grafik 4.3

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 di sumbu Y. Hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat pembiayaan berdasarkan masukan variabel independen nilai tukar dan suku bunga acuan (*BIRate*).

4.2.1.5 Pengujian Hipotesis

4.2.1.5 1. Uji Sgnifikansi f(simultan)

Untuk menjawab dua hipotesis dari penelitian ini, maka digunakanlah uji f. Uji f digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel independen (nilai tukar rupiah *BIRate*) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tingkat pembiayaan). Asumsinya adalah :

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 ditererima. Artinya, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_1 . Artinya, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53070.157	2	26535.078	114.615	.000 ^a
	Residual	13196.318	57	231.514		
	Total	66266.475	59			

a. Predictors: (Constant), SukuBungaAcuan, NilaiTukarRupiah

b. Dependent Variable: TingkatPembiayaan

Dari uji ANOVA^b Atau F test didapat nilai F hitung sebesar 114.615 dengan probabilitas 0.000. karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pembiayaan atau dapat dikatakan bahwa nilai tukar dan suku bunga acuan (*BIRate*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y (tingkat pembiayaan).

4.2.1.5.1 Uji Signifikan t (individual)

Untuk menjawab hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini, maka digunakanlah uji t. Uji t digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Asumsinya adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel.
3. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

Tabel 4.9
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-266.723	27.476		-9.707	.000
	Nilaitukarrupiah	21.251	3.214	.430	6.612	.000
	Sukubungaacuan	19.499	2.027	.626	9.621	.000

a. Dependent Variable: Tingkatpembiayaan

Dilihat dari output SPSS versi 16.0 diatas, maka diperoleh uji t. Dari kedua variabel independen yang dimasukan kedalam model regresi. Variabel nilai tukar rupiah signitifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi sebesar 0.000, karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0.05, begitu juga dengan variabel suku bunga acuan (*BI Rate*) signifikansi sebesar 0.000. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pembiayaan.

Selain itu dapat dilihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ (t_{hitung} variabel $X_1 = 6.612$ dan t_{hitung} variabel $X_2 = 9.621 > t_{tabel} = 1.6706$), Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar (X_1) dan suku bunga acuan (X_2) secara parsial berpengaruh signitifikan pada variabel tingkat pembiayaan (Y).

4.2.1.4.3 Koefisien Determinansi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen (tingkat pembiayaan) atau seberapa jauh kemampuan variabel nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan dalam menerangkan

variabel tingkat pembiayaan, maka digunakanlah koefisien determinansi dengan melihat R Square. Hasil koefisien determinansi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.895 ^a	.801	.794	12.215596

a. Predictors: (Constant), Suku bunga acuan, Nilai tukar rupiah

b. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan

Dari tampilan output SPSS Model Summary, besarnya R Square adalah 0.801 artinya bahwa variasi perubahan variabel tingkat pembiayaan (Y) dipengaruhi oleh perubahan variabel nilai tukar rupiah (X_1) dan suku bunga acuan (X_2) sebesar 80,1%. Untuk melihat regresi yang baik dapat juga dilihat dari Adjusted R^2 yaitu sebesar 0.794, hal ini sesuai dengan standar model regresi bernilai positif.

Dari hasil input data diatas, besarnya pengaruh secara bersama-sama antara nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan (*BIRate*) terhadap tingkat pembiayaan adalah sebesar (100% - 80,1% = 19,9%) sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model, seperti inflasi dan jumlah uang yang beredar (JUB).

4.2.2 Persamaan Regresi Berganda

Suatu model persamaan regresi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel lain. Dalam penelitian ini model persamaan regresi linier berganda yang disusun untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan terhadap tingkat pembiayaan adalah: $Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + e$. Dengan menggunakan program SPSS versi 16.0, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-266.723	27.476	
Nilaitukarrupiah	21.251	3.214	.430
Sukubungaacuan	19.499	2.027	.626

a. Dependent Variable: TingkatPembiayaan

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas diperoleh koefisien untuk variabel independen nilai tukar rupiah (X_1)21.251dan suku bunga acuan (*BI Rate*)(X_2)19.499.Konstanta sebesar -266.723. Sehingga model persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah $Y = -266.723 + 21.251X_1 + 19.499X_2 + e$.

Nilai konstanta (Y) sebesar-266.723 artinya jika variabel nilai tukar rupiah (X_1) dan suku bunga acuan (X_2) nilainya adalah 0 (nol), maka variabel tingkat pembiayaan (Y) akan berada pada angka -266.723.

Koefisien regresi nilai tukar rupiah (X_1) dari perhitungan linier berganda didapat nilai koefisien 21.251. Hal ini berarti jika nilai tukar rupiah (X_1) naik sebesar 1%, maka tingkat pembiayaan akan mengalami peningkatan sebesar 21.251% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Koefisien regresi suku bunga acuan (X_2) dari perhitungan linier berganda didapat nilai 19.499. Hal ini berarti jika suku bunga acuan naik sebesar 1%, maka tingkat pembiayaan akan mengalami penurunan sebesar 19.499 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

BABV

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dengan melakukan uji signifikansi antara variabel dependen (tingkat pembiayaan) dan variabel independen (nilai tukar rupiah dan suku bunga acuan). Berdasarkan uji F, yang menyatakan $F_{hitung} >$ konstanta 0.05 dengan tingkat signifikansi 0.000. maka hasil tersebut variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan.

Selain itu melalui uji signifikansi t secara parsial (individual), dapat disimpulkan masing-masing variabel berpengaruh signifikan. Hal itu dapat dilihat dari $t_{tabel} > t_{hitung}$. Jadi baik nilai tukar rupiah maupun suku bunga acuan (*BIRate*), sama-sama memberikan andil dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian dan simpulan diatas penulis ingin memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan perbankan syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bank syariah diharapkan lebih memperhatikan pergerakan nilai tukar dan suku bunga acuan (*BI rate*), karena hal tersebut memiliki peranan dalam meningkatkan pembiayaan.
2. Bank syariah diharapkan lebih memperhatikan tingkat suku bunga acuan (*BI Rate*) pada saat akan melakukan pembiayaan yang bersifat jangka panjang seperti pembiayaan investasi, produksi dan konsumsi karena pembiayaan ini menyangkut margin atau profit perbankan syariah itu sendiri.
3. Untuk para mahasiswa atau pihak yang ingin menegembangkan penelitian ini diharapkan utuk menambah literatur yang yang berkenaan dengan tingkat pembiayaan baik yang berhubungan langsung dengan Bank Indonesia maupun perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an karim
Abimayu, Yoopi. 2004. *Memahami Kurs Valuta Asing*, Jakarta : FE-UI
- Aiena, Qorry. 2011. *Analisis Pengaruh BI Rate dan Pembiayaan Terhadap Kualitas Pembiayaan Bank Syari'ah*, Semarang : IAIN Wali Songo
- Ali, Masyhud. 2002. *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, Jakarta :PT. Elek Media Komputindo
- Amaliah. 2010. *Pengaruh BI Rate Terhadap Volume Pendanaan dan Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Bandung*, Bandung: UNIBA
- Andriany, Citra. 2007. *Analisa Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Prilaku Penyaluran Dana Perbankan di Indonesia, Studi Kasus: Mei 2002- April 2007*, Jakarta : FE-UI
- Ghozali Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- . 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbitUNDIP.
- .2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit UNDIP.
- Judesseno, Rimsky K, 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, edisi 2. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Karim, Adiwarmarman. 2010. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- .2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- . 2007. *Ekonomi Makro Islami*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Karnaen, Henri.2011. *Bank Syariah Teori, Praktik an Peranannya*, Jakarta: Celestial Publising
- Kunawangsih, &Pracoyo, 2005. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, Jakarta : Grasindo

- Kuncuro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif :Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, edisi 4*, Yogyakarta:UUP STIM YKPN
- Madura, Jeff. 2006. *Keuangan Perusahaan Internasional*, Jakarta: Salemba Empat
- Molyneux, & Tornton. 1992. *Determinants Eoropean Bank Probability: A Note*.
Diakses di http://papers.ssrn.cfm?abstarct_id=1231060, pada bulan Desember. 2012 (diterjemahkan)
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press
- . 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta:UUP STIM YKPN
- . 2011. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Naceur, 2003. *The Determinants of the Tunisian Banking Industry*: di Akses di <http://www.academicdb.com> pada tanggal 6 Januari 2009 (diterjemahkan)
- Perry, W & Solikin, 2003. *Seri Kebanksentralan No.6: Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jakarta: PPSK-BI
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia:Seberapa Jauh Kebijakan moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Saeed, A. 2004. *Studi Kritis dan Intervensi kontemporer Tentang Bank Islam, Riba dan Bunga*, Yogakarta : Pustaka Pelajar
- Santoso, Singgih. 2003. *Statistik diskriptif (Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft Excel dan SPSS)*. Yogyakarta: ANDI
- Sjahdeni. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti
- Soemitra, A. 2010. *Bankan Lembaga keuangan Syariah: Go Syariah trust your heart an faith*, Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafi’i Antonio, Muhammad, 200. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gemah Insani

lampiran1**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ritno Sahadi Putra
Tempat dan Tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 15 Agustus 1990 (Dalam Ijasah)
Kedurang Bengkulu Selatan, 15 Agustus 1990 (Asli)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 54 Karang Caya Kedurang 2002
2. SMP SMPN 12 Nanjungan 2005
3. SMAN 1 Kedurang Bengkulu Selatan Tamat Tahun 2008
4. IAIN Raden Fatah Palembang Fak. Syariah Jur. Ekonomi Islam

Nama Orang Tua :

Ayah : Syarifin

Ibu : Sirai Yati

Status Dalam Keluarga : Anak Ketiga dari 5 (lima) Bersaudara

Riwayat Organisasi :

1. OSIS SMAN 1 Kedurang Bengkulu Selatan (Seksi Kesenian) periode 2006-2007
2. HMI (Anggota) periode 2011-2012

Alamat: Desa Karang Caya, Kedurang, Manna, Bengkulu Selatan Indonesia

Penulis,

RITNO SAHADI PUTRA

Lampiran 2
Tabel. 2
Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Acuan dan Tingkat Pembiayaan priode
2008-2012

No	X ₁	X ₂	Y
1	9.655	5.75	147.505
2	9.355	5.75	140.318
3	9.646	5.75	135.581
4	9.615	5.75	130.357
5	9.545	5.75	124.946
6	9.200	5.75	120.910
7	9.591	5.75	117.592
8	9.324	5.75	112.844
9	9.221	5.75	108.767
10	9.206	5.75	109.116
11	9.383	5.75	103.713
12	8.846	6.00	101.689
13	9.081	6.00	102.655
14	8.003	6.00	99.427
15	8.806	6.50	96.805
15	8.696	6.75	92.839
17	8.600	6.75	90.540
18	8.605	6.75	84.556
19	8.578	6.75	82.616
20	8.583	6.75	78.619
21	8.769	6.75	75.726
22	8.933	6.75	74.253
23	9.057	6.75	71.449

24	9.120	6.50	69.724
25	9.069	6.50	68.181
26	8.981	6.50	65.942
27	8.972	6.50	62.995
28	8.772	6.50	60.970
28	9.016	6.50	60.275
30	8.792	6.50	57.633
31	9.193	6.50	55.801
32	8.939	6.50	53.223
33	9.076	6.50	51.651
34	9.220	6.50	50.206
35	9.085	6.50	48.479
36	9.335	6.50	47.120
37	9.204	6.50	42.195
38	9.518	6.50	44.253
39	9.828	6.50	44.253
40	9.890	6.50	44.523
41	9.441	6.50	42.195
42	9.522	6.75	42.195
43	9.906	7.00	42.195
44	10.454	7.25	39.308
45	10.735	7.50	39.308
46	11.535	7.75	39.308
47	11.905	8.25	38.195
48	11.200	8.75	38.195
49	11.307	9.25	38.195
50	11.742	9.50	37.681

51	9.941	9.50	37.681
52	9.401	9.25	37.681
53	9.508	9.00	34.100
54	9.209	8.75	34.100
55	9.340	8.50	34.100
56	9.333	8.25	29.629
57	8.945	8.00	29.629
58	8.920	8.00	29.629
59	8.280	8.00	28.950
60	8.547	8.00	27.944

Lampiran 3

Tabel. 2

correlations

		Tingkat pembiayaan	Nilai tukar rupiah	Suku bunga acuan
Pearson Correlation	Tingkat pembiayaan	1.000	.691	.805
	Nilai tukar rupiah	.691	1.000	.417
	Suku bunga acuan	.805	.417	1.000
Sig. (1-tailed)	Tingkat pembiayaan	.	.000	.000
	Nilai tukar rupiah	.000	.	.000
	Suku bunga acuan	.000	.000	.
N	Tingkat pembiayaan	60	60	60
	Nilai tukar rupiah	60	60	60
	Suku bunga acuan	60	60	60

Tabel.3
Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sukubungaacuan, Nilaitukarrupiah ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan

Tabel. 4
Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Nilai tukar rupiah	Suku bunga acuan
1	1	2.984	1.000	.00	.00	.00
	2	.013	14.909	.09	.03	.94
	3	.002	34.952	.91	.97	.06

a. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan

Tabel. 5
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	31.74881	1.29451E2	6.75633E1	29.991568	60
Std. Predicted Value	-1.194	2.064	.000	1.000	60
Standard Error of Predicted Value	1.993	5.995	3.206	1.150	60
Adjusted Predicted Value	31.21562	1.28089E2	6.75255E1	29.873925	60
Residual	-3.908729E1	2.553065E1	.000000	14.955481	60
Std. Residual	-2.569	1.678	.000	.983	60
Stud. Residual	-2.596	1.696	.001	1.000	60
Deleted Residual	-3.990243E1	2.607034E1	.037809	15.493889	60
Stud. Deleted Residual	-2.740	1.725	-.006	1.021	60
Mahal. Distance	.029	8.176	1.967	2.293	60
Cook's Distance	.000	.110	.012	.017	60
Centered Leverage Value	.000	.139	.033	.039	60

a. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan

Tabel. 6
Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Tingkatpembia yaan	Predicted Value	Residual
1	1.300	147.505	127.72967	1.977533E1
2	.714	140.318	129.45104	1.086696E1
3	.527	135.581	127.55965	8.021345E0
4	.187	130.357	127.51715	2.839848E0
5	.879	124.946	111.56538	1.338062E1

6	.056	120.910	120.05283	.857173
7	-.632	117.592	127.20143	-9.609427E0
8	.550	112.844	104.47043	8.373566E0
9	-.221	108.767	112.12907	-3.362069E0
10	-.509	109.116	116.85500	-7.738999E0
11	-.723	103.713	114.70860	-1.099560E1
12	-.507	101.689	109.40888	-7.719879E0
13	.045	102.655	101.97591	.679089
14	.469	99.427	92.29029	7.136715E0
15	1.081	96.805	80.35200	1.645300E1
16	.987	92.839	77.81498	1.502402E1
17	1.169	90.540	72.74902	1.779098E1
18	1.440	84.556	62.64647	2.190953E1
19	1.432	82.616	60.83199	2.178401E1
20	1.678	78.619	53.08835	2.553065E1
21	1.139	75.726	58.40122	1.732478E1
22	1.225	74.253	55.61728	1.863572E1
23	.602	71.449	62.29024	9.158757E0
24	.056	69.724	68.87820	.845796
25	-.132	68.181	70.19580	-2.014796E0
26	.348	65.942	60.65388	5.288122E0
27	.041	62.995	62.37525	.619751
28	-.629	60.970	70.53582	-9.565820E0
29	.806	60.275	48.00924	1.226576E1
30	.304	57.633	53.00334	4.629657E0
31	.293	55.801	51.34573	4.455273E0
32	.399	53.223	47.15918	6.063816E0
33	-.948	51.651	66.07301	-1.442201E1
34	.488	50.206	42.78138	7.424623E0
35	-1.029	48.479	64.13912	-1.566012E1
36	.316	47.120	42.31384	4.806156E0

37	.294	46.886	42.42010	4.465898E0
38	.822	44.253	31.74881	1.250419E1
39	.658	45.253	35.23405	1.001895E1
40	.437	44.523	37.86924	6.653763E0
41	.196	42.195	39.20808	2.986920E0
42	.268	42.195	38.12425	4.070745E0
43	.390	42.195	36.25412	5.940876E0
44	.213	39.308	36.06286	3.245140E0
45	.493	39.308	31.81256	7.495437E0
46	.152	39.308	36.99793	2.310074E0
47	.392	38.195	32.23759	5.957408E0
48	-.169	38.195	40.75944	-2.564439E0
49	-.134	38.195	40.23625	-2.041251E0
50	-1.168	37.681	55.45232	-1.777132E1
51	-.749	37.681	49.07687	-1.139587E1
52	-1.885	36.324	65.01043	-2.868643E1
53	-2.309	34.100	69.22633	-3.512633E1
54	-2.211	34.100	67.73872	-3.363872E1
55	-1.744	34.100	60.64073	-2.654073E1
56	-2.569	29.629	68.71629	-3.908729E1
57	-2.196	29.629	63.04214	-3.341314E1
58	-.710	28.629	39.43174	-1.080274E1
59	-.679	28.950	39.28298	-1.033298E1
60	-.992	27.944	43.04449	-1.510049E1

a. Dependent Variable: Tingkat Pembiayaan